

Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Kinerja Keuangan

Isna Aeni Latifah^{1*}, Dewi Amalia¹

¹Universitas Ahmad Dahlan

e-mail : *dewi.amaliaact.uad.ac.id, isnaaini63@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.32528/nms.v1i5.227>

*Correspondensi: Isna Aeni Latifah

Email: dewi.amaliaact.uad.ac.id

Published: September, 2022



Copyright: © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Government financial performance is an illustration of the level of achievement of financial management on the implementation of a program/activity in realizing the goals, objectives, vision, and mission that contained in the regional government strategic plan. The purpose of this study was to examine the effect of the characteristics of local governments, namely regional size, intergovernmental revenue, regional expenditures, legislative measures, and audit reports in the form of audit findings and audit opinions on the financial performance of local governments. The data used in this study is secondary data sourced from the website djpk.kemenkeu.go.id, the website bpk.go.id, and the websites of each local government. The sample in this study was district and city governments in Indonesia that selected using a purposive sampling technique based on specified criteria. The data collection technique used a documentation study, then the data was analyzed using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the size of the local government, regional spending, and the size of the legislature affect the financial performance of local governments. Meanwhile, intergovernmental revenue, audit findings, and audit opinions have no effect on the financial performance of local governments.

Keyword: Financial performance, local government characteristics, audit findings, and audit opinion

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengisyaratkan bahwa setiap daerah telah diberikan kesempatan dalam melaksanakan kewenangan hak daerahnya. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah tergantung pada kemampuan dan kemauan setiap daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi yaitu dengan melihat kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan Halim (2012: 232); Saraswati dan Rioni (2019); dan Aswar (2019) menyatakan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan contoh pencapaian tujuan rencana atau kebijakan program pemerintah daerah yang diukur menggunakan indikator keuangan selama periode tertentu.

Pemerintah harus kreatif dan inovatif untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah berdampak pada pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan jalannya sistem pemerintahan. Hal ini diwujudkan pemerintah daerah dalam kemampuan menggali potensi sumber keuangan daerah (Mustikarini dan Fitriyani, 2012; Mulyani dan Wibowo, 2017; Verawaty et al., 2020).

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian Nugroho dan Prasetyo (2018) yang menggunakan variabel independen karakteristik pemerintah daerah meliputi ukuran daerah, intergovernmental revenue, dan belanja daerah sebagai faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu peneliti menambahkan variabel independen berupa ukuran legislatif dan laporan hasil pemeriksaan audit BPK berupa temuan audit dan opini audit yang diduga dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah, dilihat dari total aset, diperlukan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Aset yang dimiliki oleh pemerintah dapat digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi pemerintah daerah kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja keuangannya. Hal ini dinyatakan oleh Saraswati et al. (2019); Natoen et al. (2019); serta Mulyani dan Wibowo (2017).

Intergovernmental revenue merupakan karakteristik pemerintah daerah yang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Intergovernmental revenue (dana perimbangan) merupakan aliran pendapatan daerah untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar dana perimbangan yang diterima akan semakin besar anggaran yang dapat dikelola pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya, dengan begitu dana perimbangan dapat memengaruhi kinerja keuangan dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Djaenuri, 2012; Nugroho dan Prasetyo, 2018; Satria dan Sari, 2018).

Belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Kinerja keuangan tercermin dari belanja daerah yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah meningkatkan kualitas dan produktivitas pemerintah. Pemerintah daerah akan melayani masyarakat dengan baik dan berkualitas jika belanja daerahnya tinggi, dengan begitu akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Armaja et al., 2017; Defitri et al., 2017; Mappiase, 2018; Nugroho dan Prasetyo, 2018).

Ukuran legislatif merupakan indikator penting yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Banyaknya anggota DPRD yang ada pada pemerintah daerah berpengaruh pada kecepatan dan cakupan pengawasan atas pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran legislatif atau jumlah anggota DPRD yang aktif menerapkan pemantauan berkontribusi dalam memastikan kinerja keuangan pemerintah yang lebih baik (Dewata et al., 2017; Aswar, 2019).

Temuan audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda. Temuan audit merupakan kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah akibat pelanggaran ketentuan pengendalian intern daerah maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Temuan audit mengindikasikan kinerja keuangan. Semakin kecil temuan audit semakin baik juga kinerja keuangan daerah, di sisi lain semakin besar temuan audit kinerja keuangan cenderung menurun (Renas, 2014; Tama dan Adi, 2018).

opini audit berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan telah dibuat dalam semua hal yang relevan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan dalam opini auditor. Dengan demikian, semakin baik kualitas opini yang dihasilkan maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah (Aswar, 2019).

Perbedaan penelitian ini dari Nugroho dan Prasetyo (2018) adalah pada objek penelitian. Nugroho dan Prasetyo (2018) menggunakan objek pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pemerintah daerah kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Peneliti tertarik menggunakan pemerintah daerah kabupaten dan kota seluruh Indonesia, karena masih banyak pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia kinerja keuangannya belum efisien. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil penelitian Putra et al. (2020) menyatakan bahwa rata-rata kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia belum efisien dengan nilai 101%. Menurut Mahsun (2018:

187) kinerja keuangan dikatakan efisien dengan nilai di bawah 100% dan dikatakan tidak efisien dengan nilai di atas 100%. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota belum efisien dengan rata-rata nilai 106% (Tama dan Adi, 2018), penelitian Satria dan Sari (2018) dengan nilai 105%, kemudian penelitian dari Sari dan Halmawati (2021) 104% dan penelitian Awani dan Hariani (2021) 105%. Hasil-hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia masih belum efisien. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan bukti empiris pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja keuangan.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka) kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statistik, yaitu analisis regresi berganda.

Populasi, Sampel, Sampling

Populasi pada penelitian ini merupakan pemerintah daerah di Indonesia. Sampel penelitian adalah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia melalui website djpk.kemenkeu.go.id, temuan audit dan opini audit diperoleh melalui website bpk.go.id, dan jumlah anggota DPRD diperoleh dari website resmi masing-masing pemerintah daerah.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Kinerja keuangan merupakan kinerja keuangan yaitu mengkaji tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan dalam pelaksanaan tujuan, target, visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam rencana strategis pemerintah daerah (Mahsun, 2018: 25). Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan efisiensi dengan kriteria kriteria efisiensi yaitu 1) Apabila hasil yang diperoleh kurang dari 100% berarti efisien; 2) Apabila hasil yang diperoleh sama dengan 100% berarti efisiensi berimbang; dan 3) Apabila hasil yang diperoleh lebih dari 100% berarti tidak efisien.
2. Ukuran pemerintah daerah merupakan tolok ukur untuk menilai ukuran pemerintah dengan menggunakan nilai total aset. Total aset dalam penelitian ini diperoleh dari neraca atau laporan posisi keuangan pemerintah daerah. Semakin besar nilai total aset yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah, maka semakin banyak pula pelayanan pemerintah yang dapat diberikannya kepada masyarakat.
3. *Intergovernmental revenue* atau dana perimbangan bertujuan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya dan mengurangi kesenjangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah serta meningkatkan kapasitas daerah dalam hal memanfaatkan potensi ekonomi daerahnya. Penelitian ini *intergovernmental revenue* diukur menggunakan perbandingan total dana perimbangan dengan total pendapatan yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
4. Belanja daerah adalah semua tanggung jawab daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih selama tahun anggaran yang bersangkutan. belanja daerah diukur menggunakan total realisasi belanja

daerah yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja daerah juga digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik, dengan begitu semakin tinggi belanja daerah, semakin baik kinerja pemerintah dalam memberikan kualitas kehidupan dan pelayanan padamasyarakat.

5. Ukuran legislatif merupakan jumlah anggota dewan pada lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Informasi ukuran legislatif diperoleh dari laman masing-masing pemerintah daerah. Semakin besar jumlah anggota dewan menunjukkan semakin tingginya pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
6. Temuan audit adalah kasus yang ditemukan BPK dalam audit laporan keuangan pemerintah akibat pelanggaran ketentuan pengendalian intern daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan temuan audit BPK (dalam rupiah) yang diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

Opini audit merupakan opini BPK atas audit LKPD yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Pengukuran opini audit dengan kriteria Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) = 5, Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal (WTP-WDP) = 4, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) = 3, Tidak Wajar (TW) = 2, dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMW) = 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, yang diawali dengan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan bertujuan untuk menguji bahwa data penelitian menunjukkan kondisi yang sebenarnya sehingga layak untuk diuji dan persamaan dapat digunakan sebagai alat prediktor. Berikut ini persamaan yang akan diuji:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + \beta_5.X_5 + \beta_6.X_6 + e$$

Keterangan:

Y:	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah α : Persamaan Regresi
$\beta_1 - \beta_6$:	Koefisien Regresi Variabel Independen
X1:	Ukuran Pemerintah Daerah
X2:	<i>Intergovernmental Revenue</i>
X3:	Belanja Daerah
X4:	Ukuran Legislatif
X5:	Temuan Audit
X6:	Opini Audit
e:	<i>Error</i>

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data penelitian telah memenuhi asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dengan demikian, persamaan yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan layak digunakan sebagai alat prediktor dan kemudian lanjut pada tahapan uji hipotesis. Tabel 2 berikut ini menunjukkan hasil uji hipotesis.

Tabel 2 Hasil uji analisis regresi linier berganda

Variabel	β	<i>p value</i>	Nilai t	Keputusan
Konstanta	0,847			
Ukuran Pemerintah Daerah (X1)	-0,009	0,006	-2,731	H1 didukung
<i>Intergovernmental Revenue</i> (X2)	-0,018	0,310	-1,015	H2 tidak didukung
Belanja Daerah (X3)	0,015	0,009	2,625	H3 didukung
Ukuran Legislatif (X4)	0,000	0,045	-2,006	H4 didukung
Temuan Audit (X5)	0,001	0,376	0,886	H5 tidak didukung
Opini Audit (X6)	0,002	0,312	1,013	H6 tidak didukung
Variabel dependen = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)				
<i>Adjusted R square</i> = 0,011F				
statistic = 2,420				
Signifikansi = 0,025 ^b				

Sumber: Data sekunder, diolah (2022)

Berdasarkan hasil Tabel 2 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,847 - 0,009X1 + 0,015X3 + 0,000X4 + e$$

Dilihat dari persamaan regresi tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta dalam persamaan linier dalam penelitian ini mempunyai nilai positif sebesar 0,847 artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel dependen dan independen. Hal ini menunjukkan jika nilai seluruh variabel independen sama dengan nol atau tidak ada perubahan, berarti rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 84,7%.
2. Koefisien ukuran pemerintah daerah (X1) sebesar -0,009, yang artinya berdasarkan penelitian ini jika variabel lain nilainya tetap dan ukuran pemerintah daerah mengalami kenaikan 1 satuan maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,009. Nilai *unstandardized coefficients* β yang bernilai negatif menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang tidak satu arah antara ukuran pemerintah daerah (X1) dengan kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Artinya jika ukuran pemerintah daerah meningkat maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun.
3. Koefisien belanja daerah (X3) sebesar 0,015, yang artinya berdasarkan penelitian ini jika variabel lain nilainya tetap dan belanja daerah mengalami kenaikan 1 satuan maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,015. Nilai *unstandardized coefficients* β ini bernilai positif, maka menunjukkan bahwa terjadi hubungan satu arah antara belanja daerah (X2) dengan kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Artinya ketika belanja daerah meningkat maka kinerja keuangan pemerintah daerahnya juga akan meningkat.
4. Variabel ukuran legislatif (X4) sebesar 0,000, artinya berdasarkan hasil penelitian ini jika variabel lain nilainya tetap dan ukuran legislatif mengalami kenaikan 1 satuan maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,000. Nilai *unstandardized coefficients* β ini memiliki nilai positif menunjukkan bahwa terjadi hubungan satu arah antara ukuran legislatif (X4)

dengan kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Artinya jika ukuran legislatif semakin banyak maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui hasil koefisien determinasi (*adjusted R*²) sebesar 0,011. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, belanja daerah, ukuran legislatif, temuan audit, dan opini audit mampu menjelaskan variabel kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 1,1%. Sedangkan 98,9% oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi penelitian ini. Nilai signifikansi F sebesar 0,025 yang artinya nilai signifikansi $0,025 < \alpha$ menunjukkan bahwa minimal terdapat satu variabel independen yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tabel 2 juga menunjukkan hasil uji t sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi variabel ukuran pemerintah daerah sebesar 0,008 dan angka ini $< \alpha$ sehingga H1 dalam penelitian ini dapat didukung. Artinya ukuran pemerintah daerah (X1) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).
2. Nilai signifikansi variabel *intergovernmental revenue* sebesar 0,310 yang lebih kecil dari α , maka H2 dalam penelitian ini tidak didukung. Artinya *intergovernmental revenue* (X2) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).
3. Nilai signifikansi variabel belanja daerah sebesar 0,009 yang $< \alpha$ sehingga H3 dalam penelitian ini dapat didukung. Artinya belanja daerah (X3) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).
4. Nilai signifikansi variabel ukuran legislatif 0,045 dan angka ini $< \alpha$ maka H4 dalam penelitian ini dapat didukung. Dengan demikian ukuran legislatif (X4) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).
5. Nilai signifikansi variabel temuan audit bernilai 0,376 ($> \alpha$) sehingga H5 dalam penelitian ini tidak didukung. Artinya temuan audit (X5) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).
6. Nilai signifikansi variabel opini audit sebesar 0,312 ($> \alpha$) sehingga H6 dalam penelitian ini tidak didukung. Dengan demikian opini audit (X6) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis pertama didukung bahwa ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitiannya Natoen *et al.* (2019) dan penelitian Mulyani dan Wibowo (2017). Koefisien regresi variabel ukuran pemerintah daerah bernilai negatif sebesar $-0,009$, yang artinya terdapat hubungan tidak searah antara ukuran dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Setiap kenaikan satu unit total aset akan memberikan risiko penurunan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Natoen *et al.* (2019) hal ini muncul karena semakin luas wilayah, semakin besar pula risiko penyalahgunaan dan semakin besar pula tuntutan dari masyarakat.

Hipotesis dua penelitian ini tidak dapat didukung dan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Natoen *et al.* (2019) dan Aswar (2019) menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut, menurut Aswar (2019) *intergovernmental revenue* belum dapat dikelola dengan baik dan optimal oleh pemerintah daerah. Dana eksternal yang diberikan tanpa pengembalian itu harus digunakan sebagai penambah kekurangan potensi sumber daya daerah dan menutupi biaya-biaya lain yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu pemda juga

belum dapat mengeloladana eksternal tersebut secara optimal untuk mendanai kebutuhan kegiatan pemerintah daerah. Kenyataan masih adanya kesenjangan pemberian dana eksternal antara pemerintah kabupaten/kota satu dengan lainnya juga menjadi penyebab temuan ini.

Hipotesis tiga dalam penelitian ini didukung bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil uji hipotesis ini sejalan dengan penelitian Mappiasse (2018) dan Armaja *et al.* (2017). Belanja daerah telah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup. Hal ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial fasilitas umum yang memadai dan pengembangan sistem jaminan sosial. Pengeluaran daerah menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat.

Hipotesis empat dalam penelitian ini didukung, berarti ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Aswar (2019) serta Gustianra dan Serly (2019). Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan hubungan searah bahwa jumlah anggota legislatif yang bertugas melakukan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

Hipotesis lima dalam penelitian ini tidak didukung, berarti temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Alpi dan Ramadhan (2018) dan Noviyanti dan Kiswanto (2016). Pemerintah daerah yang menerima laporan audit dalam jumlah besar belum tentu memiliki kinerja keuangan yang buruk karena ketidakpahaman secara administratif.

Hipotesis enam dalam penelitian ini tidak didukung, berarti opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Mappiasse (2018) dan Dewata *et al.* (2017). Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia kurang memperhatikan hasil laporan audit untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa karakteristik pemerintah daerah yang meliputi ukuran pemerintah, belanja daerah, dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Apabila dilihat perhipotesis, hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama, tiga, dan empat dapat didukung dalam penelitian ini. Sedangkan intergovernmental revenue, temuan audit, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah secara statistik signifikan memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dan mendukung argumen Saraswati *et al.* (2019); Natoen *et al.* (2019); serta Mulyani dan Wibowo (2017). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa belanja daerah secara statistik signifikan memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dan mendukung argumen Armaja *et al.* (2017); Defitri *et al.* (2017); Mappiasse (2018); Nugroho dan Prasetyo (2018). Demikian pula menunjukkan bahwa variabel ukuran legislatif secara statistik signifikan memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dan mendukung argumen Dewata *et al.* (2017) dan Aswar (2019). Saran bagi penelitian sejenis selanjutnya agar dapat memertimbangkan 1) dapat menggunakan pengukuran atas variabel kinerja keuangan pemerintah daerah selain yang sudah digunakan dalam penelitian ini, misalnya efektivitas dan ekonomis (Satria dan Sari, 2018) dan menambahkan variabel independen yang diduga dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti leverage (Dewata *et al.*, 2017), populasi, dan wealth (Natoen *et al.*, 2019; Salsabila dan Rahayu, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F., dan Ramadhan, P. R. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 115– 124.
- Aswar, K. (2019). Financial Performance of Local Governments in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 4(6), 126-131.
- Armaja, A., Ibrahim, R., dan Aliamin, A. (2017). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168- 181.
- Awani, M. F., dan Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 95-102.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2021. Opini WTP Laporan Keuangan Pemda Alami Peningkatan. <https://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-laporan-keuangan-pemda-alami-peningkatan>. Diakses tanggal 30 April 2022.
- Defitri, S. Y., Fitriasia, S., dan Maison, W. (2017). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168–181.
- Dewata, E., Ilmiyyah, N. M., dan Kadarwati, S. (2017). Faktor–faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 147-162.
- Djenuri, A. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Jakarta: Penerbit Ghalis Indonesia.
- Ghozali, I. (2020). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mahsun, M. (2018). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPF.
- Mappiasse, A. L. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 1(1), 1–7.
- Mulyani, S., dan Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012- 2015). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1), 57–66.
- Mustikarini, W. A., dan Fitriyasi, D. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Jurnal PDEB* 15 (1), 1-22.
- Natoen, A., Febrianti, A., Sri Kadarwati, dan Ardiani, S. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 106–117.
- Noviyanti, N. A., dan Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal* 5 (1), 2252-6765.

-
- Nugroho, T. R., dan Prasetyo, N. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 27-34.
- Putra, R., Wijayanti, R. R., dan Ardhiarisca, O. (2020). Measurement of Regional Government Financial Performance in Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 22(1), 83-94.
- Renas. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2009-2011. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(3), 513-527.
- Sari, B. I. dan Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(1), 1-11.
- Salsabilla, S., dan Rahayu, S. (2021). Pengaruh Wealth, Leverage dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019). *Eproceedings of Management*, 8(6), 8480-8487.
- Satria, D. I., dan Sari, H. P. (2018). Pengaruh Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage, dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Lhokseumawe). *At-Tasyri: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 10(1), 9–21.
- Tama, I. G. M. A. A., dan Adi, P. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Perspektif Akuntansi*, 1(1), 91–113.
- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., dan Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Journal Management, Business, and Accounting*, 19(1), 21-37.